

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran

Triwulan III

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

TRIWULAN III TAHUN 2017

Katalog BPS : 9302020.11
Nomor Publikasi : 11550.1714
Nomor ISSN : 2502.0889
Ukuran Buku : 21 x 14,8 cm
Jumlah Halaman : v + 30 Halaman

Penanggung Jawab/Pengarah : Wahyudin
Editor : Andariati Afrida, Wahyu Agung Sutikno
Penulis : Widya Syafitri, Afrizah
Pengolah Data & Grafik : Widya Syafitri, Afrizah
Penyunting dan Finalisasi : Wahyu Agung Sutikno
Cover : Wahyu Agung Sutikno
Foto Cover : Instagram @atagraphia
Instagram @hendradharmawan09

Diterbitkan Oleh :

© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR

Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB dilihat dari sisi pengeluaran dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 2017

Kepala BPS Provinsi Aceh



Wahyudin



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga.....	2
1.2.2 Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga.....	3
1.2.3 Konsumsi Pemerintah.....	4
1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	5
1.2.5 Perubahan Inventori.....	6
1.2.6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	7
1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	8
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah.....	8
II. Tinjauan PDRB Provinsi Aceh	9
2.1 Nilai PDRB Provinsi Aceh.....	9
2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.....	10
III. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran.....	11
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>c-to-c</i>	11
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i>	12
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i>	15
3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera.....	16



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan III Tahun 2017 (Triliun Rupiah).....	9
Gambar 2. Nilai PDRB ADHK 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh	10
Gambar 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> dan Distribusi PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan III Tahun 2017 (Persen).....	11
Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> Triwulan III Tahun 2017..	13
Gambar 5. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> (persen).....	14
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> Triwulan I-2016 – Triwulan III-2017 (Persen).....	15
Gambar 7. Pertumbuhan PDRB Kumulatif (<i>c-to-c</i>) Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2017 (persen).....	16
Gambar 8. Distribusi PDRB Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2017 (persen).....	17
Gambar 9. Pertumbuhan PDRB <i>y-on-y</i> Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2017 (persen).....	18
Gambar 10. Pertumbuhan PDRB <i>q-to-q</i> Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2017 (persen).....	19



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)	21
Tabel 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)	22
Tabel 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	23
Tabel 4. Laju Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	24
Tabel 5. Laju Pertumbuhan <i>q-to-q</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	25
Tabel 6. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100).....	26
Tabel 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (Persen).....	27
Tabel 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku	28
Tabel 9. Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Menurut Pengeluaran (persen)	29
Tabel 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan III-2017.....	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/ daerah khususnya di bidang ekonomi.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan parameter untuk memantau

perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut Pengeluaran.

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain:

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya.
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj) , perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri.

Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumahtangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun di mana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan

terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

1.2.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga

Pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi Profesi (Orprof),
4. Perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/ hobi,
5. Lembaga swadaya masyarakat,
6. Lembaga keagamaan,
7. Organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,
3. Rekreasi dan Kebudayaan,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/Jaminan sosial,
6. Keagamaan,
7. Partai politik, Organisasi buruh dan Organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa-Jasa.

1.2.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas

barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Yang juga termasuk PK-P adalah *social transfer in kind purchased market production*. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 1968, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri.

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB seri baru ini PK-P diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal,
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal,
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, monumen, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air.
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :

- a. Alat-alat transportasi, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain-lain,
- b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
- c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
- d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.
4. Produk kekayaan intelektual meliputi :
Research and development, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan *database*, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.
5. Sistem persenjataan.
6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.
7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
8. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan

hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.

9. Barang modal lainnya.

1.2.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai

input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai

sebagai bahan bakar atau persediaan.

- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, pula pasir, dan gandum.

1.2.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga *free on board* atau f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction* dan *direct purchase non-resident* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa (BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik Ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.



1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction*, *direct purchase* penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar

negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik Impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

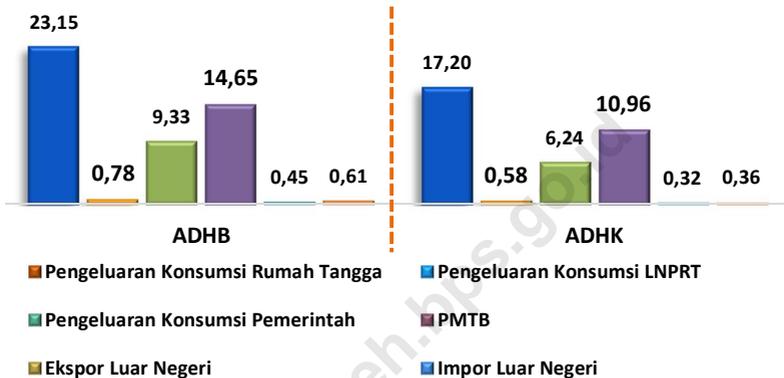
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah

Nilai net ekspor antardaerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antardaerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah.

II. TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

Gambar 1.

Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan III Tahun 2017 (Triliun Rupiah)



2.1 Nilai PDRB Provinsi Aceh

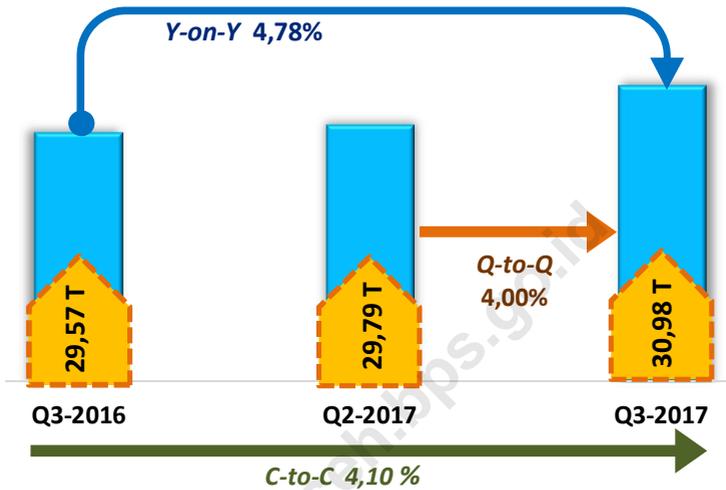
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Aceh pada Triwulan III tahun 2017 masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yaitu sebesar 23,15 triliun rupiah, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) sebesar 17,20 triliun rupiah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nilai PDRB ADHB sebesar 14,65 triliun rupiah dan ADHK 2010 sebesar 10,96 triliun rupiah. Pada komponen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) nilai PDRB ADHB sebesar 9,33 triliun rupiah dan ADHK 2010 sebesar 6,24 triliun rupiah.

Selanjutnya Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) nilai PDRB ADHB sebesar 0,78 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 0,58 triliun rupiah. Nilai Ekspor Luar Negeri Aceh ADHB sebesar 0,45 triliun rupiah dan ADHK sebesar 0,32 triliun rupiah. Nilai Impor Luar Negeri Aceh sebesar 0,61 triliun rupiah dan ADHK sebesar 0,36 triliun rupiah.

Gambar 2.

Nilai PDRB ADHK 2010 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh



2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Tinjauan perkembangan PDRB secara kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017 (*c-to-c*) menggambarkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada periode Januari hingga September tahun 2017 ADHK 2010 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Ekonomi Aceh secara kumulatif tumbuh cukup signifikan sebesar 4,10 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan (*y-on-y*) merupakan gambaran pertumbuhan PDRB ADHK

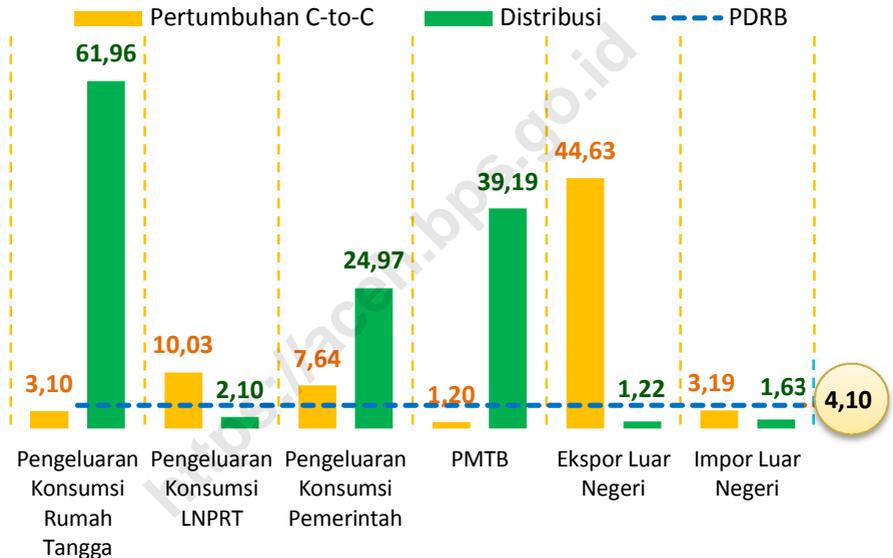
2010 pada triwulan III tahun 2017 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2016. Perekonomian Aceh secara *y-on-y* mengalami pertumbuhan yang juga cukup signifikan sebesar 4,78 persen dengan nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 30,98 triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2017 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara *q-to-q* juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen (gambar 2).

III. PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

Gambar 3.

Laju Pertumbuhan *c-to-c* dan Distribusi PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran, Triwulan III Tahun 2017 (Persen)



3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *c-to-c*

Ekonomi Aceh secara kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017 (*c-to-c*) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 4,10 persen dibandingkan dengan kumulatif triwulan I hingga triwulan III tahun 2016.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017. Ekspor Luar Negeri merupakan komponen yang tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 44,63 persen. Namun demikian, kontribusi ekspor luar negeri Aceh masih sangat



minim terhadap total PDRB yaitu hanya sebesar 1,22 persen.

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) juga tumbuh cukup signifikan yaitu sebesar 10,03 persen dengan kontribusi sebesar 2,10 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang yaitu sebesar 7,64 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memiliki kontribusi ketiga tertinggi di PDRB Aceh yaitu sebesar 24,97 persen.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) masih menjadi komponen yang mendominasi pada struktur ekonomi Aceh dengan kontribusi sebesar 61,96 persen dan tumbuh sebesar 3,10 persen. Pertumbuhan yang signifikan terutama terjadi pada sub-komponen Transportasi dan Komunikasi, Penginapan dan Hotel, serta Makanan dan Minuman.

Sementara itu pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar 1,20 persen.

PMTB masih menjadi komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 39,19 persen.

Sebagai komponen pengurang dalam PDRB, Impor Luar Negeri Aceh secara kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017 naik sebesar 3,19 persen. Kenaikan Impor Luar Negeri menunjukkan hal yang kurang baik dalam neraca perdagangan luar negeri Aceh. Kenaikan nilai impor terjadi terutama pada impor barang, sedangkan pada impor jasa justru terjadi penurunan. Kontribusi dari komponen Impor Luar Negeri masih sangat kecil terhadap PDRB Aceh yaitu hanya sebesar 1,63 persen.

3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y*

Ekonomi Aceh pada triwulan III tahun 2017 tumbuh sebesar 4,78 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2016. Berdasarkan PDRB Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Aceh secara *y-on-y* hampir sejalan dengan pertumbuhan *c-to-c*, dimana pertumbuhan terjadi pada seluruh

komponen pengeluaran. Pertumbuhan *y-on-y* tersebut dipengaruhi oleh tumbuhnya komponen Ekspor Luar Negeri, Konsumsi Pemerintah, dan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga.

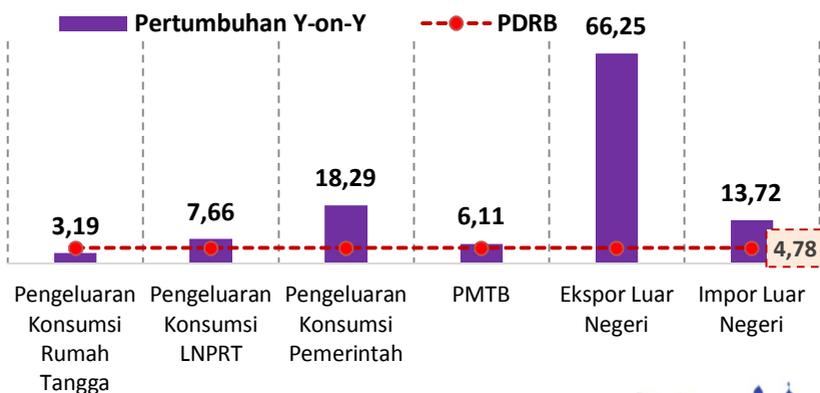
Ekspor Luar Negeri Aceh menjadi komponen dengan pertumbuhan yang paling tinggi di triwulan III tahun 2017 yaitu sebesar 66,25 persen. Kenaikan tersebut terutama terjadi pada ekspor barang non migas berupa batu bara. Impor Luar Negeri pada triwulan III tahun 2017 dibandingkan triwulan III tahun 2016 juga meningkat sebesar 13,72 persen. Kenaikan impor didorong oleh naiknya impor barang, sedangkan impor jasa mengalami penurunan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan sebesar 18,29 persen di triwulan III tahun 2017 dibandingkan triwulan III tahun 2016. Pertumbuhan tersebut terjadi baik pada konsumsi individu pemerintah maupun konsumsi kolektif pemerintah.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh cukup tinggi di triwulan III tahun 2017 yaitu sebesar 7,66 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relatif stabil sebesar 3,19 persen. Pada konsumsi rumah tangga peningkatan yang signifikan terjadi pada sub-komponen Transportasi, Komunikasi dan Kesehatan (gambar 4).

Gambar 4.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y* Triwulan III Tahun 2017



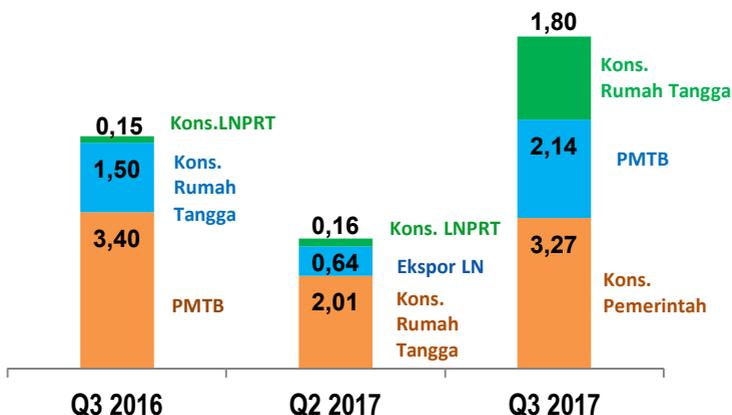
Jika dilihat berdasarkan sumber pertumbuhannya, pada triwulan III tahun 2016 sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari komponen PMTB yaitu sebesar 3,40 persen, kemudian Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 1,50 persen. Pada triwulan II tahun 2017 sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri yaitu masing-masing sebesar 2,01 persen dan 0,64 persen.

Di triwulan III tahun 2017, komponen Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah menjadi komponen dengan sumber pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu sebesar 3,27 persen. Kemudian komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua yaitu sebesar 2,14 persen. Sumber pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan PMTB memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara *y-on-y* di triwulan III tahun 2017 (Gambar 5).

Gambar 5.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y* Triwulan III Tahun 2017 (Persen)



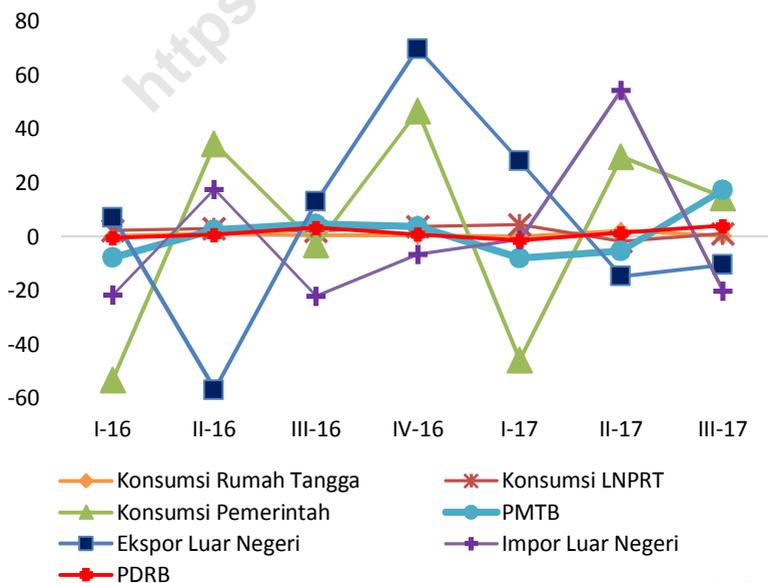
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q-to-q

Ekonomi Aceh pada triwulan III tahun 2017 tumbuh sebesar 4,00 persen dibandingkan triwulan II tahun 2017. PMTB merupakan komponen yang tumbuh paling tinggi pada triwulan III tahun 2017 dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 17,42 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah secara triwulanan juga tumbuh cukup signifikan sebesar 14,62 persen.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT meningkat masing-masing sebesar 0,36 persen dan 1,04 persen.

Komponen Ekspor Luar Negeri dan Impor Luar Negeri pada triwulan III tahun 2017 dibandingkan triwulan II tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu masing-masing turun sebesar 10,44 persen, dan 20,20 persen. (gambar 6).

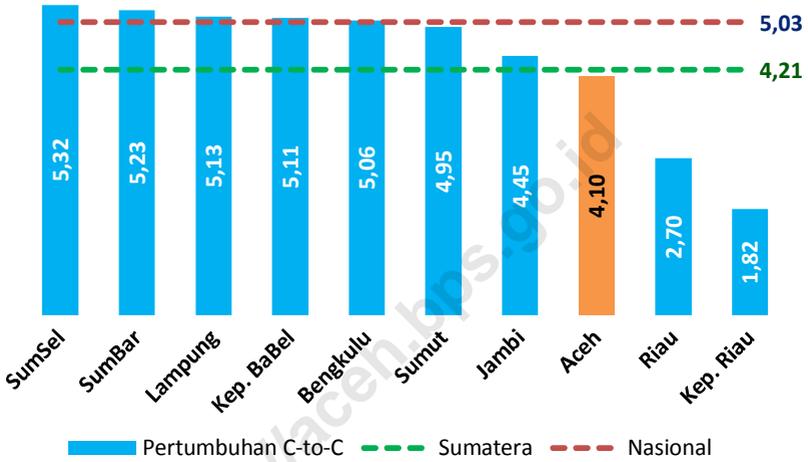
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q-to-q Triwulan I Tahun 2016 – Triwulan III Tahun 2017 (persen)



3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

Gambar 7.

Pertumbuhan PDRB Kumulatif (c-to-c) Regional Sumatera Triwulan I hingga Triwulan III Tahun 2017 (Persen)

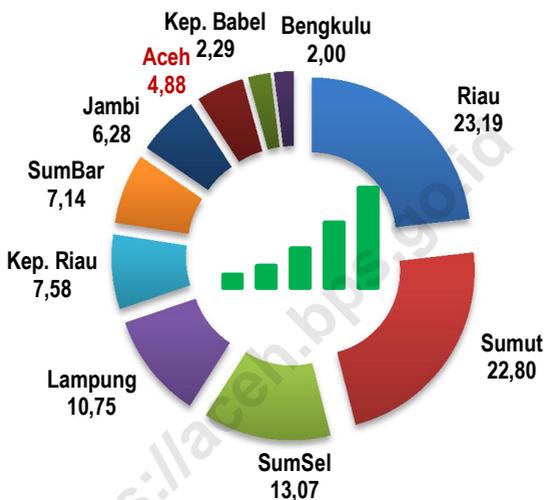


Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Sumatera, secara kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017 ekonomi regional Sumatera tumbuh sebesar 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di wilayah regional Sumatera, Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang

mengalami pertumbuhan tertinggi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017, yaitu sebesar 5,32 persen. Sedangkan Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah se-Sumatera yaitu sebesar 1,82 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh sendiri dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2017 berada pada urutan ketiga terendah se-Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Riau, yaitu sebesar 4,10 persen (gambar 7).

Gambar 8.

Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera
Triwulan III Tahun 2017 (Persen)



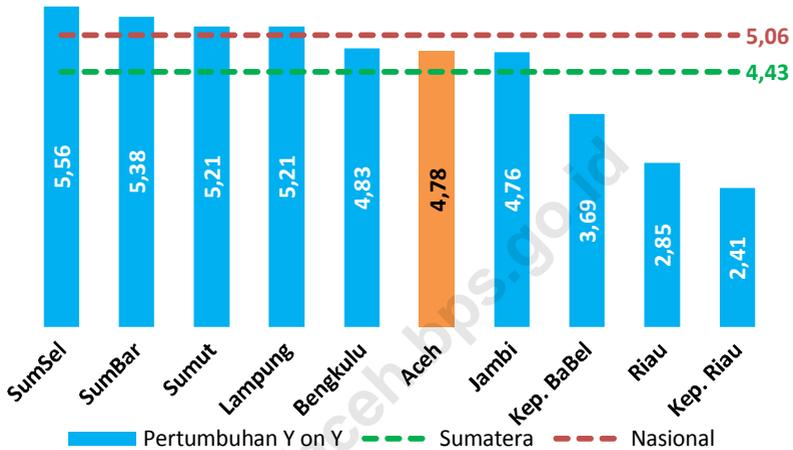
Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari PDRB masing-masing Provinsi di wilayah regional Sumatera terhadap PDRB total se-Sumatera, Riau dan Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 23,19 persen dan 22,80 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari PDRB Regional Sumatera

triwulan III tahun 2017 berasal dari PDRB Riau dan Sumatera Utara.

Kontribusi terkecil terhadap PDRB se-Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 2,00 persen. PDRB Aceh sendiri memiliki kontribusi sebesar 4,88 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan III-2017 (gambar 8).

Gambar 9.

Laju Pertumbuhan PDRB *y-on-y* Regional Sumatera
Triwulan III Tahun 2017 (Persen)

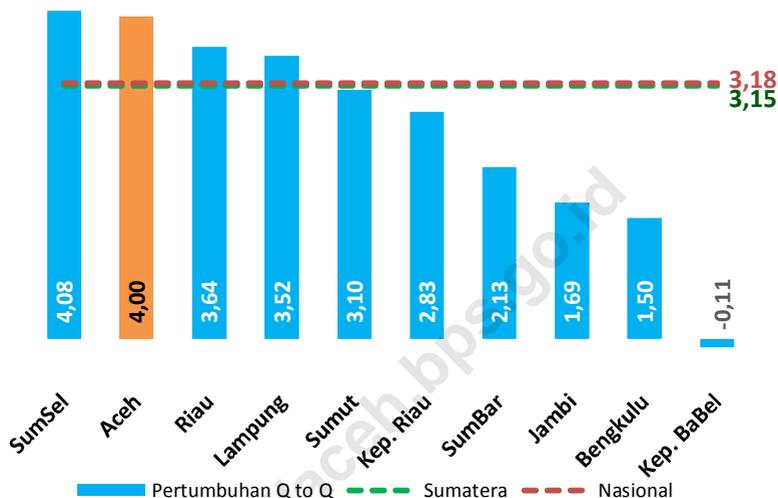


Secara *year on year* (*y-on-y*) pertumbuhan ekonomi regional Sumatera juga tumbuh sebesar 4,43 persen di triwulan III-2017 dibandingkan triwulan III-2016. Ekonomi Nasional juga tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera yaitu sebesar 5,06 persen. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Sumatera yaitu sebesar 5,56 persen.

Sedangkan Kepulauan Riau merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah se-Sumatera yaitu sebesar 2,41 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III-2017 secara *y-on-y* tumbuh sebesar 4,78 persen dan menjadi provinsi kelima terendah di regional Sumatera (gambar 9).

Gambar 10.

Laju Pertumbuhan PDRB *q-to-q* Regional Sumatera
Triwulan III Tahun 2017 (Persen)



Secara triwulanan (*q-to-q*) pertumbuhan ekonomi regional Sumatera terpaat cukup dekat dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, dimana ekonomi regional Sumatera pada triwulan III-2017 dibandingkan dengan triwulan II-2017 tumbuh sebesar 3,15 persen, sedangkan ekonomi Nasional tumbuh sebesar 3,18 persen. Sumatera Selatan menjadi Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang

cukup pesat sebesar 4,08 persen, sedangkan Bengkulu menjadi yang terendah dengan pertumbuhan 1,50 persen. Selain itu, Kep. Bangka Belitung mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,11 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III-2017 secara *q-to-q* tumbuh sebesar 4,00 persen dan menjadi provinsi kedua tertinggi di regional Sumatera (gambar 10).



LAMPIRAN

<https://aceh.bps.go.id>



Tabel 1.

PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21,14	21,84	22,76	23,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	0,71	0,77	0,78
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,36	8,14	8,29	9,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,41	13,12	12,25	14,65
5. Perubahan Inventori	0,01	0,01	-0,02	-0,04
6. Ekspor Luar Negeri	0,24	0,27	0,52	0,45
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,67	0,56	0,75	0,61
8. Net Ekspor Antar Daerah	-8,47	-8,46	-8,07	-10,35
P D R B	33,70	35,08	35,74	37,37

Tabel 2.

**PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)**

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,56	16,67	17,14	17,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,53	0,54	0,57	0,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,44	5,28	4,20	6,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,85	10,32	9,86	10,96
5. Perubahan Inventori	0,00	0,01	-0,01	-0,03
6. Ekspor Luar Negeri	0,17	0,19	0,35	0,32
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,41	0,32	0,45	0,36
8. Net Ekspor Antar Daerah	-3,53	-3,12	-2,59	-3,92
P D R B	28,61	29,57	29,79	30,98

Tabel 3.

Laju Pertumbuhan *c-to-c* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,96	3,52	3,05	3,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6,18	6,97	11,26	10,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,32	-3,73	1,70	7,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,48	8,50	-1,41	1,20
5. Perubahan Inventori	-132,19	-125,67	-397,35	-392,70
6. Ekspor Luar Negeri	-23,67	-46,14	37,27	44,63
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-51,14	-47,17	-1,23	3,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	45,60	20,18	-17,00	-1,90
PDRB	3,20	2,97	3,75	4,10

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,29	2,66	3,47	3,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	7,38	8,52	8,73	7,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,69	-12,98	0,15	18,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,01	10,48	-5,31	6,11
5. Perubahan Inventori	-75,43	-120,46	-368,69	-386,86
6. Ekspor Luar Negeri	-41,27	-71,12	110,11	66,25
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-38,50	-34,55	10,87	13,72
8. Net Ekspor Antar Daerah	55,09	-8,80	-26,66	25,59
PDRB	2,67	2,52	4,10	4,78

Tabel 5.

Laju Pertumbuhan q -to- q PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,33	0,64	2,17	0,36
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,97	2,05	-1,67	1,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34,51	-2,96	29,78	14,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,48	4,78	-5,40	17,42
5. Perubahan Inventori	-56,84	163,98	-62,56	181,83
6. Ekspor Luar Negeri	-57,00	13,18	-14,72	-10,44
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	17,72	-22,19	54,43	-20,20
8. Net Ekspor Antar Daerah	63,66	-11,54	21,46	51,48
P D R B	0,72	3,33	1,40	4,00

Tabel 6.

Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	127,66	131,01	132,79	134,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	128,67	132,43	133,84	135,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	153,73	154,32	152,16	149,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	125,99	127,08	131,27	133,69
5. Perubahan Inventori	141,96	145,62	150,08	149,52
6. Ekspor Luar Negeri	143,30	143,26	146,85	144,31
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	163,78	175,62	165,58	169,01
8. Net Ekspor Antar Daerah	240,04	271,02	311,67	263,88
PDRB	117,77	118,64	119,99	120,63

Tabel 7.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,44	2,62	0,42	1,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,25	2,92	0,08	1,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,87	0,38	5,65	-1,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,85	0,86	1,82	1,84
5. Perubahan Inventori	3,85	2,58	-1,03	-0,37
6. Ekspor Luar Negeri	3,88	-0,03	2,52	-1,73
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	2,60	7,23	-5,01	2,07
8. Net Ekspor Antar Daerah	-22,08	12,91	0,15	-15,33
PDRB	1,52	0,73	0,35	0,53

Tabel 8.

Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,74	62,25	63,67	61,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,01	2,03	2,14	2,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24,81	23,22	23,19	24,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,84	37,40	34,27	39,19
5. Perubahan Inventori	0,02	0,04	-0,04	-0,11
6. Ekspor Luar Negeri	0,71	0,77	1,45	1,22
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	1,98	1,59	2,09	1,63
8. Net Ekspor Antar Daerah	-25,14	-24,13	-22,57	-27,69
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 9.

Sumber Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	2016		2017	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,45	1,50	2,01	1,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,13	0,15	0,16	0,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,22	-2,73	0,03	3,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,92	3,40	-1,83	2,14
5. Perubahan Inventori	-0,04	0,20	-0,05	-0,13
6. Ekspor Luar Negeri	-0,42	-1,62	0,64	0,42
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,92	-0,58	0,15	0,15
8. Net Ekspor Antar Daerah	-4,50	1,05	3,29	-2,70
PDRB	2,67	2,52	4,10	4,78

Tabel 10.

Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera, Triwulan III Tahun 2017

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB Q3-2017 (Triliun Rupiah)	PDRB ADHB Q3-2017 (Triliun Rupiah)	Distribusi PDRB Q3-2017 ADHB (%)	Laju Pertumbuhan (%)		
				c-to-c	y-on-y	q-to-q
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	37,37	30,98	4,88	4,10	4,78	4,00
Sumatera Utara	174,48	124,08	22,80	4,95	5,21	3,10
Sumatera Barat	54,66	39,58	7,14	5,23	5,38	2,13
Riau	177,45	119,50	23,19	2,70	2,85	3,64
Jambi	48,08	34,32	6,28	4,45	4,76	1,69
Sumatera Selatan	100,03	72,94	13,07	5,32	5,56	4,08
Bengkulu	15,31	10,57	2,00	5,06	4,83	1,50
Lampung	82,28	57,96	10,75	5,13	5,21	3,52
Kep. Bangka Belitung	17,55	12,51	2,29	5,11	3,69	-0,11
Kepulauan Riau	58,04	42,10	7,58	1,82	2,41	2,83
SUMATERA	765,24	544,54	100,00	4,21	4,43	3,15

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

<http://www.aceh.bps.go.id> Email: bps1100@bps.go.id



9 772502 088008